

MODEL ANALISIS PENGAWASAN BPD DAMPAKNYA PADA TRANSPARANSI KEUANGAN DESA MELALUI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI KABUPATEN TANGERANG DENGAN KINERJA PERANGKAT DESA SEBAGAI MODERASI

Doddy Mulyono¹⁾, Yudi Nur Supriadi ²⁾, Agus Rahmat Hermawanto³⁾

¹⁾ Dosen, STISIP Yuppentek

Email : api.accounting@yahoo.com

²⁾Dosen, STISIP Yuppentek

Email: yudinur@student.upi.edu

³⁾ Dosen, STT Bandung

E-mail: agusrahmat@sttb.com,

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of BPD supervision that has an impact on transparency in village financial management with performance variables as moderation. This research model is very important to provide input in good village financial management. If the BPD supervision process goes well, the performance of village officials can be optimal so that village development will be successful. This study took 152 samples of village officials in Tangerang district, this study used AMOS structural equation modeling (SEM) analysis. The results of this study indicate that BPD supervision has a positive and significant impact on village financial transparency, but the performance variable is not able to moderate BPD supervision over village financial transparency. This research model is very unique because it can be an evaluation for stakeholders, especially the village government in increasing the supervisory role of the BPD to improve the performance of village officials, thus, village financial transparency will be well realized for the welfare of village communities through the development.

Keywords: performance, supervision, village financial transparency,

PENDAHULUAN

Penelitian mengenai desa lima tahun terakhir sudah mendominasi para peneliti, hal ini didorong dengan disyahkannya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Bayu Setyo Nugroho, 2018). Kinerja pemerintah desa menjadi sorotan yang sangat tajam terutama dalam transparansi pengelolaan keuangan yang menyebabkan terjadinya penyelewengan anggaran (Nyoman Judarmita Ni Luh Supadmi, 2017).

Menurut Jaitun (2013) menemukan bahwa setiap aparatur desa yang memiliki komitmen pertanggung jawaban dalam pembangunan akan mampu meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan desa. Selanjutnya, menurut Adha (2016) menemukan adanya peningkatan kinerja perangkat desa dapat dipengaruhi oleh pengawasan BPD. Keberhasilan pengelolaan keuangan desa melalui transparansi sangat ditentukan dalam mengoptimalkan kinerja perangkat desa sehingga kebijakan dalam mewujudkan target, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi suatu organisasi akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan dan juga akan membentuk pemerintahan

yang baik salah satunya peran pengawasan BPD sebagai bagian dari kontrol dan evaluasi pelaksanaan program pemerintahan desa (M. Amin, 2019).

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan laporan keuangan desa pada tahun 2019 sebanyak 34 desa bermasalah terkait penyaluran dana desa serta munculnya 3 desa fiktif, hal itu dinilai tidak wajar. Sebab, dari laporan keuangan terdapat desa baru yang tidak berpenduduk. Namun desa tersebut tetap mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat untuk 74.957 desa yang ada di Indonesia, padahal dana desa itu untuk pembangunan yang akan membantu masyarakat desa lebih baik lagi dalam kehidupan. Adanya dana desa akan menurunkan tingkat kemiskinan di desa hingga 40%, saat ini laporan kemiskinan 20%, bisa turun jadi 12%. (www.liputan6.com_2019).



Sumber : Kementerian Keuangan RI. 2020

Gambar. 1
Alokasi Anggaran Dana Desa selama 6 tahun

Besarnya anggaran yang digulirkan untuk desa akan menjadi masalah jika dilaksanakan tanpa transparansi, sehingga akan sulit menciptakan akuntabilitas. Transparansi tidak hanya yang berhubungan dengan keuangan, tetapi juga perencanaan. Transparansi adalah salah satu wujud pertanggungjawaban tatakelola pemerintah dengan masyarakatnya. Untuk itu transparansi desa merupakan keputusan atau kebijakan yang diambil bersama masyarakat dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah desa. Transparansi yang dikembangkan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap tatakelola pemerintah desa yang baik dampaknya meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan desa.

Hasil penelitian Teguh (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa menunjukkan dalam pengelolaan dana desa mulai dari pelaksanaan sampai dengan pencapaian hasilnya dapat dipertanggung jawabkan didepan perangkat desa, namun belum dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh masyarakat desa. Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa yaitu masih adanya aturan-aturan baru yang muncul di badan permusyawaratan desa (BPD) dan Ketua RT, faktor cuaca yang tidak mendukung sehingga kegiatan penyuplai bahan bangunan menjadi terlambat, dan Pemerintah desa masih belum memaksimalkan pemanfaatan waktu dalam penyusunan laporan dan penyelesaian laporan pertanggungjawaban sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pentingnya penelitian ini akan memberikan masukan berharga terutama menjawab persoalan pengelolaan dana desa yang transparan dengan mengetahui sejauhmana pengawasan BPD dan kinerja mampu berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) yang merupakan aplikasi, dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola keuangan khususnya di desa di Kabupaten Tangerang.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja dan Transparansi Pengelolaan keuangan.

Pengawasan merupakan suatu proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan (Yahya, 2006:133). Pengawasan dapat disimpulkan sebagai salah satu fungsi manajemen yang juga sangat menentukan tercapai atau tidaknya tujuan organisasi, hal ini berkaitan dengan kemampuan pimpinan untuk membawa organisasi yang dipimpinnya mencapai tujuan sesuai peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Indikator Pengawasan dalam penelitian ini adalah: 1). Penerapan standart kerja 2). Penilaian pekerjaan 3). Perbandingan hasil pekerjaan 4). Mengkoreksi pekerjaan (Manulang, 2004:184).

Kinerja adalah suatu yang ditampilkan oleh seorang atau suatu proses yang berkaitan dengan tugas kerja yang ditetapkan (Amir. 2015). Hasil penelitian Ari Hanafi Adha dan Ernawati Ernawati, (2016) menjelaskan pengawasan yang dilakukan oleh badan permusyawaratan desa (BPD) terhadap kinerja kepala desa berada dalam kategori baik hal itu dilihat dari tanggapan responden terhadap pertanyaan yang diberikan berkaitan dengan menetapkan alat ukur (standar), melakukan penilaian (evaluasi), dan melakukan tindakan perbaikan (*corrective action*) sehingga pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja Kepala Desa dalam pembangunan.

Berdasarkan teori di atas, dirumuskan hipotesis **H1: terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat pemerintah desa.**

Pengawasan BPD terhadap transparansi dana desa didasarkan pada Undang-undang No, 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 55, fungsi pengawasan BPD terhadap pemerintah desa sehingga dapat mengontrol pelaksanaan jalannya anggaran pendapatan desa. Oleh karena itu, tidak akan menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan serta berpotensi adanya penyimpangan pengelolaan keuangan desa (Abdullah, 2017). Pengawasan dapat berupa pengawasan langsung, tidak langsung, preventif dan represif.

Hasil penelitian M. Amin (2018) menjelaskan adanya pengaruh pengawasan BPD terhadap transparansi dana desa. Potensi para perangkat pemerintah desa sebagai *leading sector* terciptanya

pelaporan yang baik dan transparansi serta mudah diakses. Pengawasan BPD terhadap anggaran sangat memberikan dampak positif terhadap terciptanya transparansi keuangan desa.

Berdasarkan teori di atas, dirumuskan hipotesis **H2 : terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan BPD terhadap transparansi Pengelolaan keuangan desa.**

Pengaruh Kinerja perangkat terhadap Transparansi Pengelolaan keuangan Desa.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/ program/ kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi, dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi plening atau organisasi (Mahsun, 2014). Pengertian kinerja (*performance*) yaitu menggambarkan tentang tingkat pencapaian dalam pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan demi mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur apabila individu atau sekelompok karyawan sudah mempunyai kriteria atau standar keberhasilan yang ditetapkan oleh organisasi. Oleh karena itu, tanpa adanya tujuan dan target yang ditetapkan dalam pengukuran, maka kinerja pada seseorang atau kinerja organisasi tidak dapat diketahui bila tidak ada tolok ukur keberhasilannya (Moheriono, 2012).

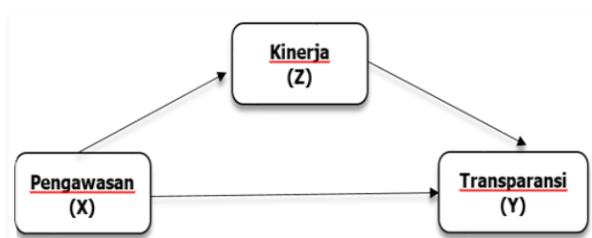
Menurut Mardiasmo (2009), pengertian transparansi merupakan keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Menurut Krina (2003) merupakan prinsip-prinsip transparansi menekankan pada dua aspek dengan indikator-indikator: komunikasi public oleh pemerintah yaitu meliputi: penyediaan informasi yang jelas tentang tanggung jawab dan menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar. Hak masyarakat terhadap akses informasi yaitu meliputi: kemudahan akses informasi dan meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian M. Amin (2018) menjelaskan kinerja perangkat pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa.

Berdasarkan teori di atas, dirumuskan hipotesis **H3: terdapat pengaruh yang signifikan antara kinerja perangkat terhadap transparansi keuangan desa**

MODEL HIPOTESIS

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka model hipotesis untuk meneliti pengaruh pengawasan terhadap transparansi keuangan yang dimediasi oleh kinerja dapat dilihat pada gambar. 2 sebagai berikut :



Gambar. 2 Model analisis pengawasan perangkat desa dampaknya pada transparansi keuangan dengan terhadap kinerja sebagai moderasi.

METODOLOGI

Studi ini diuji pada ruang lingkup pemerintahan desa, yang telah menerapkan proses keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) di Kabupaten Tangerang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik *purposive sampling* 152 kuesioner yang dibagikan kepada kepala desa dan ketua badan permusyawaratan desa (BPD) sebagai responden.

Analisis data untuk pengujian penelitian ini menggunakan analisis pemodelan persamaan struktural. Dengan AMOS 23 (Joseph, Hair, William, Barry, Babin, Rolph, 2014). Pendekatan ini dilakukan dengan menguji parameter yang dihasilkan dari *goodness of fit*, kemudian menguji hipotesis penelitian tentang hubungan kausalitas yang dikembangkan dalam model penelitian ini.

Tabel 1. Skala items for measures

Nama dan item skala reflektif (diukur pada 1 –5 poin Skala Likert yang menunjukkan sejauh mana responden setuju dengan pernyataan berikut)	Standardized factor loading
Pengawasan BPD (Cronbach's $\alpha = 1.067$)	
- BPD menerapkan standart kerja. (P1)	0.829
- BPD melakukan penilaian pekerjaan. (P2)	0.852
- BPD melakukan perbandingan hasil pekerjaan (P3)	0.815
- BPD mengkoreksi dan perbaikan hasil pekerjaan. (P4)	0.748
Kinerja perangkat desa (Cronbach's $\alpha = 1.236$)	
- Perangkat desa melakukan pembangunan sesuai musrenbangdes. (K1)	0.812
- Perangkat desa mengukur penilaian proses pembangunan. (K2)	0.450
- Perangkat desa melakukan tindakan perbaikan pembangunan. (K3)	0.681
- Kesiapan perangkat desa dalam penerimaan dana desa (K4)	1.013
Transparansi pengelolaan keuangan desa (Cronbach's $\alpha = 0.847$)	
- Komunikasi publik melalui Musrendes libatkan stakeholder. (T1)	0.954
- Penyediaan informasi yang terbuka setiap proyek desa (T2)	0.352
- Kesesuaian penyusunan perencanaan dana desa dengan laporan (T3)	0.449
- Kemudahan akses informasi aplikasi sistem keuangan desa (T4)	0.587
- Meningkatnya penghasilan desa sepadan dengan pendapatan (T5)	0.937

Sumber : Analisis 2020

Analysis factor confirmatori (CFA) dirancang untuk menguji multidimensionalitas dari konstruk teoretis. Analisis ini sering juga disebut pengujian validitas konstruk teoretis. Benchmark yang digunakan adalah nilai loading factor. Indikator dinyatakan valid jika memiliki nilai loading factor $> 0,70$. Sebaliknya, jika nilai loading factor $< 0,70$ maka indikator dinyatakan tidak valid untuk mengukur konstruk (Ghozali, 2017). Tolak ukur lain dalam menilai signifikansi bobot faktor adalah rasio kritis (CR). Hal ini dimaksudkan untuk mengukur apakah indikator dalam setiap konstruk secara

signifikan adalah dimensi konstruk, asalkan $CR > 2.00$ dan $p\text{-value} < 0,05$ dapat diartikan bahwa indikator tersebut adalah dimensi signifikan dari konstruk yang diukur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa pengawasan BPD dibangun dengan indikator kesatu sampai keempat diatas faktor $> 0,6$ yang menunjukkan bahwa indikator secara statistik valid. Hasil untuk kinerja dengan indikator satu sampai empat, dan transparansi memiliki 5 indikator mengandung faktor $> 0,6$ yang berarti bahwa indikator tersebut secara statistik valid.

Hasil uji validitas dan kinerja perangkat desa menunjukkan bahwa kemampuan inovasi dibangun dengan indikator kesatu, ketiga dan keempat sedangkan Perangkat desa mengukur penilaian proses pembangunan (K2) 0,450 ($< 0,6$) yang menggambarkan bahwa indikator secara statistik tidak valid.

Hasil uji validitas transparansi pengelolaan keuangan desa menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan desa dibangun dengan indikator kesatu keempat dan kelima, untuk penyediaan informasi yang terbuka setiap proyek desa (T2) dan kesesuaian penyusunan perencanaan dana desa dengan laporan (T3) memiliki faktor pemuatan 0,352 dan 0,449 (pemuatan faktor $< 0,6$) yang menggambarkan bahwa indikator secara statistik tidak valid. Ini dilakukan dengan menggunakan teknik estimasi kemungkinan maksimum.

Sampel yang digunakan di sini adalah 152 sampel berdasarkan pada alasan bahwa jumlah sampel telah memenuhi kriteria untuk kecukupan sampel yang direkomendasikan teknik estimasi kemungkinan maksimum dan rata-rata *error variance of indicator* (AVE) kriteria di mana minimum ukuran sampel adalah 152 yang diperkirakan memuat standar diperkirakan kurang dari 0,7 dan skor kesamaan sama dengan 0,5. Penilaian item kuesioner untuk pengujian menggunakan analisis faktor konfirmatori untuk menguji hubungan antara konstruk dan indikator. Untuk pengujian kemampuan nyata, *Cronbach alpha* (*Cronbach's α*) digunakan. Hasil tes dapat ditunjukkan pada tabel 1.

TEMUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana pengawasan BPD dan kinerja mampu berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan desa melalui aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES) desa di Kabupaten Tangerang.

Pengujian hipotesis penelitian ini dibantu dengan program analisis pemodelan persamaan struktural AMOS 23. Hasil pemodelan persamaan struktural. Analisis dalam model lengkap diilustrasikan pada Gambar 3. Sementara itu, Tabel 1 memperlihatkan hasil uji asumsi dalam mengembangkan pemodelan persamaan struktural. Hasil yang baik ditunjukkan oleh uji konfirmasi model lengkap karena telah memenuhi kriteria *goodness of fit*. Struktur model digunakan untuk menggambarkan model kausalitas penelitian dengan hubungan berjenjang. Hasil pengujian menunjukkan bahwa

kriteria *goodness of fit* telah terpenuhi seperti yang ditunjukkan dengan Chi-Square pada 22,754 dan nilai propabilitas pada 0, 441. Dua asumsi tersebut selesai. Skor IFI berada di 1,000, GFI di 0,940, AGFI di 0,911, dan RMSEA berada di 0,000 yang menunjukkan bahwa skor telah memenuhi *cut-off* yang telah ditentukan. Ini menyiratkan bahwa model penelitian diterima dan memenuhi kriteria yang telah ditentukan.

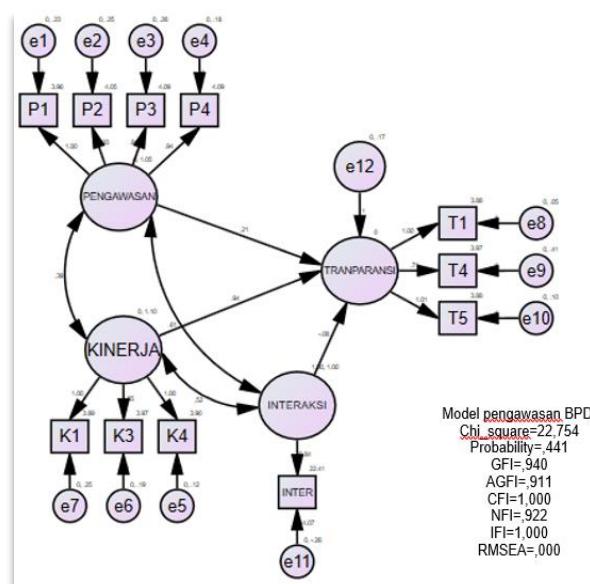
Gambar 2 menunjukkan koefisien jalur standar dari hubungan antara pengawasan BPD dan kinerja mampu berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan desa. Temuan penelitian ini juga ditunjukkan pada Tabel 2 yang merumuskan 5 hipotesis.

Tabel. 3. Penilaian Hipotesis

hypotesis	Uraian Pengaruh	Standard Deviation	T -value	p – Values	Keterangan
H1	Pengawasan → Transparansi	0.203	5.401	0.040	Signifikan
H2	Pengawasan → Kinerja	0.390	3.940	0.029	Signifikan
H3	Kinerja → Transparansi	0.978	9.411	0.009	Signifikan
Moderasi:					
Pengawasan → Kinerja → Transparansi		0.082	0,788	0.112	Tidak Signifikan

Sumber : Analisis 2020

Ketiga hipotesis yang dikembangkan di sini seperti tabel 3 mengilustrasikan hubungan antara pengawasan BPD dan kinerja mampu berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan desa. *t-value* dan propabilitas menggambarkan hubungan positif dan signifikan dari masing-masing variabel.



Gambar 3. *structural equation modeling* pengawasan terhadap transparansi keuangan yang dimediasi oleh kinerja

Hasil analisis hipotesis diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

H1: terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat pemerintah desa. Tabel 3 menunjukkan model jalur struktural yang menjelaskan hubungan antara pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat pemerintah desa. Peninjauan langkah-langkah *good-of-fit* menunjukkan bahwa mereka jauh melebihi nilai *cut-off*. Temuan jalur struktural menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan dan positif antara pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat pemerintah desa ($t = 5,401 > 1,96$) dengan nilai signifikansi ($0,040 < 0,05$). Hipotesis 1 diterima.

H2: Pengaruh kinerja aparatur memberi efek pada transparansi pengelolaan keuangan desa. Tabel 3 menunjukkan model hubungan struktural antara kinerja aparatur memberi efek pada transparansi pengelolaan keuangan desa. Temuan jalur struktural menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja aparatur memberi efek pada transparansi pengelolaan keuangan desa ($t = 3,940 > 1,96$) dengan nilai signifikansi ($0,029 < 0,05$). Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima.

H3: Kinerja aparatur memberikan efek yang tidak signifikan pada transparansi keuangan desa. Tabel 3 menunjukkan model hubungan struktural antara kinerja aparatur dengan transparansi keuangan desa. Temuan jalur struktural menunjukkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara kinerja aparatur pada transparansi keuangan desa ($t = 9,411 < 1,96$) dengan nilai signifikansi ($0,009 > 0,05$). Hipotesis 2 diterima.

Menganalisis dampak kinerja aparatur desa sebagai variabel moderasi melalui Amos 23 dengan 152 nilai sampel. Tabel 3 hasil moderasi kinerja aparatur desa tidak mampu memberikan mediasi hubungan pengawasan BPD dengan transparansi pengelolaan keuangan sebesar $0,082$ ($t = < 1,96$) dengan nilai signifikansi ($0,112 > 0,05$) tidak memenuhi untuk memoderasi.

Diskusi Hasil Penelitian

Studi ini dirancang untuk menguji secara empiris pengawasan BPD mampu menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa, dengan variabel kinerja perangkat desa sebagai mediasi. Temuan ini memberikan bukti bahwa pengawasan BPD mampu menciptakan transparansi pengelolaan keuangan desa sebagaimana penelitian dari M. Amin (2018) banyak yang menyimpulkan bahwa keberhasilan pengawasan BPD melalui : 1). upaya menerapkan standart kerja perangkat desa dalam bekerja, 2). melakukan penilaian pekerjaan perangkat desa terutama pembangunan fisik dan non fisik, 3). melakukan perbandingan hasil pekerjaan pembangunan yang dilakukan oleh perangkat desa, 4). selalu mengkoreksi dan memperbaikan hasil pekerjaan mampu menjadikan sebagian desa di Kabupaten Tangerang melakukan transparansi pengelolaan keuangan desa melalui system Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah satu Ketua BPD di Kabupaten Tangerang Bapak X menyatakan :

“Rata rata proses transparansi pengelolaan pembangunan di desa sudah cukup baik, hal ini adanya keterlibatan pengawasan dari pihak BPD”

Temuan dilapangan secara empiris menemukan hubungan yang kuat antara pengawasan BPD terhadap kinerja perangkat desa, hal ini sesuai penelitian dari (M. Amin, 2018; Amir, M. F.2015; Ari Hanafi Adha dan Ernawati Ernawati, 2016). Kekuatan pengawasan BPD dalam peningkatan kinerja sangat besar sekali, proses yang menjadi nilai positif seperti 1). Meningkatnya proses pembangunan yang sesuai dengan usulan musrenbangdes. 2). Setiap usulan koreksi dana kritik dari BPD dalam proses pembangunan direspon cepat oleh perangkat desa dan 3). Adanya peningkatan kesiapan perangkat desa dalam penerimaan dana desa. Namun sangat disayangkan nilai negatifnya yang belum adanya upaya optimalisasi perangkat desa dalam mengukur dan penilaian keberhasilan proses pembangunan dengan nilai 0.450, sehingga kesuksesannya diukur oleh pihak desa sendiri, hal ini menyebabkan prefensi yang negatif dari masyarakat.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah satu perangkat desa di Kabupaten Tangerang Bapak X menyatakan :

“kinerja pemerintah desa sudah baik namun setiap pelaksanaan pasti ada kekuranganya tidak sempurna, hal ini dijadikan sebagai masukan untuk koreksi pembangunan desa kedepannya”

Temuan selanjutnya adanya pengaruh antara kinerja perangkat desa yang berdampak pada transparansi pengelolaan keuangan sebagaimana hasil penelitian (Abdullah, 2017, M. Amin, 2018; Krina, L. (2003) secara teoritis semakin meningkatnya kinerja aparatur desa maka nilai transparansi pengelolaan keuangan semakin baik, temuan penelitian yang menyatakan nilai positif diantaranya : 1). Adanya pelaksanaan Musrendes dengan baik melibatkan seluruh stakeholder. 2). Adanya kemudahan semua orang atas akses informasi aplikasi sistem keuangan desa dan 3). Adanya keterbukaan informasi pada semua masyarakat penghasilan desa dengan pendapatan. Namun hal negatif dari hasil survei sebesar 0.352 dan 0.449 tidak valid, adapun yang ditemukan yaitu: 1). Lemahnya sebagain desa di Kabupaten penyediaan informasi yang terbuka setiap proyek desa baik berupa papan atau media lainnya dan 2). Masih adanya ketidaksesuaian penyusunan perencanaan dana desa dengan laporan.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara salah satu perangkat desa di Kabupaten Tangerang Bapak X menyatakan :

“sebetulnya banyak kendala ketika proyek berjalan kadang papan proyek roboh sehingga hilang dibawa orang, begitu juga kendala dalam pelaporan keuangan dalam pelaksanaan sering berbeda karena ketika pelaksanaan perencanaan berbeda dengan pelaksanaannya bisa disebabkan situasi ya berubah contoh ketika bangun turab ternyata akses jalan nya rusak maka yang didahulukan perbaikan jalan dulu”.

Secara keseluruhan pengawasan BPD mampu memberikan dampak yang baik terhadap kinerjanya perangkat desa dan mendorong adanya transparansi desa. Namun hasil penelitian tidak adanya peran

moderasi kinerja dalam pengaruh pengawasan BPD terhadap transparansi keuangan. Hasil penelitian menemukan nilai t-value $0,788 < 1,60$.

Implikasi Manajerial dan Penelitian Masa Depan

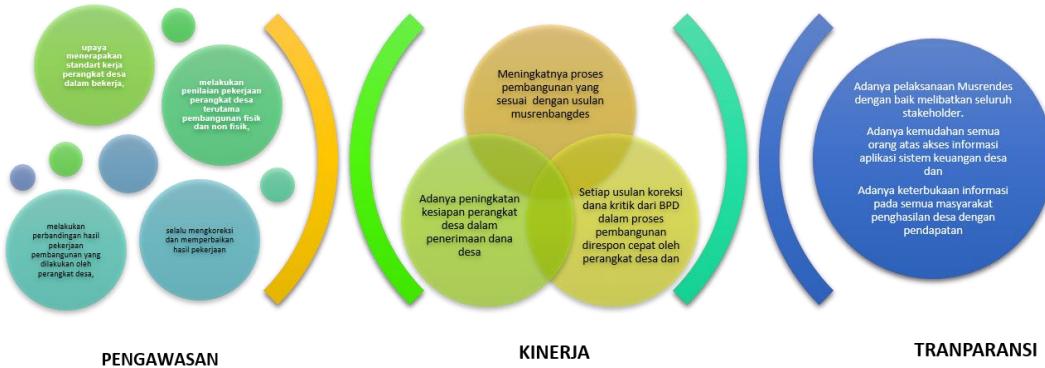
Implikasi manajerial dalam penelitian ini menunjukkan perlunya fokus serius dari setiap badan permusyawaratan desa (BPD) untuk menjalankan tupoksi sesuai undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, jika pengawasannya optimal maka akan berdampak pada peningkatan kinerja perangkat desa serta transparansi pengelolaan keuangan. Untuk alasan ini, indikator pengawasan BPD perlu dipertahankan oleh setiap desa di Kabupaten Tangerang bahkan perlu lebih diberikan porsi yang banyak mengenai kewenangannya.

Pemerintah desa dan anggota badan permusyawaratan desa akan memiliki intergrasi yang baik sehingga pengawasan dana desa dapat berjalan dengan baik. Sangat penting sekali kejelasan prosedur pengawasan dana harus di perhatikan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa serta masyarakat sehingga dana desa dapat diawasi dengan baik. Anggota badan permusyawaratan desa sebaiknya memberikan ketegasan kepada pemerintah desa agar sebelum mengimplementasikan program yang didanai oleh alokasi dana desa harus ada musyawarah penentuan program prioritas sehingga dapat tercipta keselarasan antara pemerintah desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat. Dengan demikian tidak ada penyelewengan dana desa yang diresahkan oleh semua pihak terutama kasus yang terjadi 2019 di Indonesia sangat tinggi.

Implikasi manajerial dari penelitian ini menjelaskan bahwa badan permusyawaratan desa dan perangkat perlu mempertimbangkan cara mengimplementasikan transparansi pengelolaan keuangan melalui aplikasi dengan baik. Terutama kinerja perangkat desa perlu merekrut SDM yang ahli bidang keuangan dan teknologi komputer, karena masih ada desa yang pembuatan perencanaan melibatkan pihak luar atau mempercayakan kepada petugas Kecamatan. Hal ini agar kinerja perangkat optimal dan transparansi pengelolaan melalui aplikasi terus meningkat.

Studi penelitian ini dalam meningkatkan peran BPD dalam peningkatan kinerja dan transpransi perlu mempertimbangkan faktor unik dari pengawasan, terutama yang memenuhi kebutuhan dan tantangan saat ini desa kedepannya, variabel kinerja belum berhasil memoderasi pengawasan terhadap transparansi keuangan, hal ini bisa di dorong untuk penelitian dimasa depan. Pengawasan sebagai salah satu variabel yang jarang dipelajari dapat dikembangkan untuk penelitian masa depan khususnya kajian di desa.

Penulis dapat merumuskan novelty model baru mengenai model pengawasan BPD, dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4. Novelty Model pengawasan

KESIMPULAN

Studi saat ini memberikan bukti bahwa pengawasan BPD dapat meningkatkan kinerja perangkat desa yang dampaknya pada peningakatan transparansi pengelolaan keuangan desa. Studi yang dilakukan pada desa di Kabupaten Tangerang telah memberikan kontribusi yang nyata terutama dalam mengatasi persoalan penyelewengan dana desa agar menjadi perhatian semua pihak terutama di Indonesia, dengan menerapkan model pengawasan BPD yang baik di setiap desa di Seluruh Indonesia. Dengan demikian pengawasan BPD perlu ditingkatkan peran dan kewenangannya agar mampu menjadi penegak integritas pelaksanaan pembangunan di desa, tidak ada yang berani lagi menyalahgunakan dana desa karena tingkat transparansi tetap tinggi setiap saat dan waktu bisa dikontrol dengan keterbukaan informasi yang baik oleh masyarakat melalui pengawasan BPD.

Adanya pengaruh yang kuat pengawasan terhadap transparansi sebesar 4.401, pengawasan terhadap kinerja sebesar 3.411 dan kinerja terhadap transparansi sebesar 9.411. Ketiga hipotesis ini menjadi bukti pentingnya pembangunan desa tidak akan lepas dari peran pengawasan BPD yang akan meningkatkan kinerja dan dampaknya pada peningkatakan transparansi pengelolaan keuangan desa.

Saran dan rekomendasi dari penulis, hal negatif dari hasil penelitian ini yang perlu ditingkatkan adalah: upaya optimalisasi perangkat desa dalam mengukur dan penilaian keberhasilan proses pembangunan, perlu ditingkatkan penyediaan informasi yang terbuka setiap proyek desa baik berupa papan atau media lainnya dan harus adanya kesesuaian penyusunan perencanaan dana desa dengan laporan. Dengan demikian tujuan dari pencapaian pembangunan desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud dengan baik karena integritas pengawasan dan kinerja berjalan dengan baik ditandai keterbukaan transparansi pengelolaan keuangan dengan baik juga.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, 2017. *Efektivitas pengawasan BPD terhadap transparansi dana Desa*. Fakultas Syariah dan hukum, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

Ari Hanafi Adha dan Ernawati Ernawati, 2016. *Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap Kinerja Kepala Desa dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.* JOM FISIP Vol. 3 No. 2 – Oktober 2016.

Amir, M. F. 2015. *Memahami evaluasi kinerja karyawan.* Jakarta: Mitra Wacana Media

Bayu Setyo Nugroho. 2019. *Mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.* SMERU research institute No 2 tahun 2019.

Ghozali, I. 2017. *Structural Equation Modeling Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 24* (7th ed.). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. <https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.2010.02280.x>

Joseph, Hair, William, Barry, Babin, Rolph, A. (2014). *Multivariate Data Anysis* (Seventh). USA: British_Library._<https://doi.org/10.1038/259433b0>

Krina, L. 2003. *Indikator dan alat ukur prinsip akuntabilitas transparansi dan partisipasi.* Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

Mahsun, M. (2014). *Pengukuran kinerja sektor publik.* yogyakarta: BPFE.

Moheriono. (2012). *Pengukuran kinerja berbasis kompetensi.* Jakarta: PT. Raja Gravindo Persada

Manullang, M. 2004. *Dasar-dasar manajemen.* Yogyakarta. . Gajah Mada University Press.

M. Amin (2018). *Pengaruh kinerja dan pengawasan aparatur pemerintan desa terhadap transparansi keuangan desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur.* Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa.Vol IV, No. 2, Desember 2019 ISSN 2528-1852.

Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik.* Yogyakarta: PT. ANDI

www.liputan6.com_2019. Diakses pada tanggal 2 februari 2020.